



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PETRUS PEDO MARAN
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 737548

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.038.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 557 m2/166 m2 di KAB / KOTA FLORES TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 651.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 346 m2/72 m2 di KAB / KOTA FLORES TIMUR, WARISAN Rp. 452.000.000
3. Tanah Seluas 624 m2 di KAB / KOTA FLORES TIMUR, WARISAN Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 12.062 m2 di KAB / KOTA FLORES TIMUR, WARISAN Rp. 65.000.000
5. Tanah Seluas 8.352 m2 di KAB / KOTA FLORES TIMUR, WARISAN Rp. 55.000.000
6. Tanah Seluas 1.218 m2 di KAB / KOTA FLORES TIMUR, WARISAN Rp. 25.000.000
7. Tanah Seluas 470 m2 di KAB / KOTA FLORES TIMUR, WARISAN Rp. 25.000.000
8. Tanah Seluas 1.547 m2 di KAB / KOTA FLORES TIMUR, WARISAN Rp. 40.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/120 m2 di KAB / KOTA FLORES TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **55.000.000**



1. MOBIL, TOYOTA KIJANG ROVER Tahun 1996, HASIL SENDIRI
Rp. 32.000.000
2. MOTOR, SUZUKI FD 125 XSD Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI LX150H Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	158.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	316.758.199
F. HARTA LAINNYA	Rp.	372.000.000
Sub Total	Rp.	2.940.258.199
III. HUTANG	Rp.	75.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.865.258.199

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.